

SURAT TERBUKA UNTUK DPR RI

Mendesak DPR RI Menghentikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Yang Terhormat,

- 1. Puan Maharani, Ketua DPR RI**
- 2. Ketua Badan Legislasi DPR RI**
- 3. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**
- 4. Ketua Fraksi Golongan Karya**
- 5. Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
- 6. Ketua Fraksi Partai NasDem**
- 7. Ketua Fraksi Partai Demokrat**
- 8. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**
- 9. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**
- 10. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional**
- 11. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Bangsa Indonesia saat ini tengah dilanda krisis pandemi global corona virus disease (COVID-19). Krisis ini telah kita ketahui bersama sebagai akibat dari lambannya negara merespon COVID-19 ini sejak awal, yang mengakibatkan korban terus berjatuhan. Dampak sosial dan ekonomi dirasakan oleh rakyat, khususnya dari kelompok miskin dan marjinal lainnya. Situasi Darurat Kesehatan Masyarakat ini seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari wakil rakyat yang duduk di DPR RI, sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai legislator.

Ironinya wakil rakyat yang duduk di DPR RI justru memaksakan kehendaknya untuk memuluskan sejumlah legislasi yang sejak awal mendapatkan penolakan yang kuat dari masyarakat sipil, antara lain RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU KUHP, dan RUU Minerba. Kami menyesalkan anggota DPR yang tidak memiliki kepekaan di tengah krisis dan bahkan menggunakan krisis sebagai kesempatan atau celah untuk kepentingan investasi.

Karenanya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melalui surat terbuka yang kami tujukan kepada Ketua DPR RI, Ketua Badan Legislasi dan Ketua Fraksi menyampaikan pandangan politik sebagai berikut:

Pertama; Mendesak kepada anggota DPR RI untuk menghentikan pembahasan legislasi yang mengancam keselamatan rakyat, antara lain RUU Omnibus Law Cipta Kerja. RUU Omnibus



Law sejak awal cacat dengan prosedural karena mengabaikan prinsip pelibatan rakyat secara bermakna, dan tujuan dari RUU ini justru mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Selain RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kami juga mendesak DPR menghentikan pembahasan draft legislasi lainnya yang mengancam keselamatan hidup rakyat dan lingkungan hidup, antara lain RUU Omnibus Law IKN, RUU KUHP dan RUU Minerba.

Kedua; Mendesak kepada anggota DPR RI Memprioritaskan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI untuk penanganan dan pencegahan COVID-19, serta dampak yang dialami oleh rakyat, khususnya dari kelompok miskin dan marjinal. Kami mengingatkan agar DPR RI tidak main-main dengan persoalan keselamatan rakyat.

Ketiga; Perlu kami tegaskan kembali, bahwa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil di Indonesia menegaskan sikap politik kami **MENOLAK RUU Omnibus Law Cipta Kerja**. Penolakan kami didasari atas pandangan bahwa RUU ini pada hakikatnya sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik yang melangengkan kekuasaan ekonomi yang bertumpu pada investasi dan korporasi skala besar. Bagi kami, RUU Omnibus Law ini adalah Omnibus CILAKA bagi rakyat dan lingkungan hidup.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Atas perhatian dari anda semua sebagai Wakil Rakyat, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 April 2020

Salam Adil dan Lestari,

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia



Nur Hidayati
Direktur Eksekutif



Risma Umar
Ketua Dewan Nasional